



RENCANA KERJA (RENJA PERUBAHAN) 2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dapat diselesaikan tepat waktu.

Renja Perubahan adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun Anggaran 2025 merupakan penjabaran teknis RPJMD sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selain itu, RENJA mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pembangunan, yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program provinsi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Melalui Renja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dimasa mendatang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA Perubahan ini dapat diselesaikan, kami sangat mengharapkan saran, pendapat maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan RENJA Perubahan Tahun 2025 BKPSDM Kab. Luwu Timur. Kami berharap RENJA Perubahan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Luwu Timur khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Luwu Timur.

Malili, 01 Juli 2025

Pt. KEPALA BKPSDM



Drs. RAPIUDDIN

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19660121 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA. 2025	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM.....	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kab. Luwu Timur.....	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM.....	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Timur	43
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021	3
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM 2021-2026.....	13
Tabel 2.2.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017	14
Tabel 2.2.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017	15
Tabel 2.2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM	19
Tabel 2.2.5	Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	21
Tabel 2.2.6	Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan Pangkat dan Golongan	21
Tabel 2.2.7	Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan Jabatan Struktural	22
Tabel 2.2.8	Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan Jabatan Fungsional	22
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	26
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	36
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2025	38
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2025	40
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2025	52

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Struktur Organisasi BKPSDM	21
-----------	----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan tetap memperhatikan Sumber Daya Manusia yang tersedia.

Dalam Undang-Undang ini juga mewajibkan bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai control bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Renja Perubahan disusun dengan berpedoman kepada RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan, program dan kegiatan sub kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Desember 2025.

Renja BKPSDM disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM, yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 :

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Tahun 2025;
2. Sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan manfaat bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
3. Sebagai pedoman untuk pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah sesuai Rencana Strategi (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai target kinerja sasaran dan tujuan yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2025;
2. Memberikan gambaran mengenai target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2025;
3. Memberikan gambaran mengenai kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja Perubahan.

- 1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Perubahan, Proses penyusunan Renja Perubahan SKPD, keterkaitan Renja Perubahan SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Perubahan BKPSDM Tahun Anggaran 2025.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan BKPSDM.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA. 2025

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja perubahan yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/ kegiatan dan sekaligus merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Laporan kinerja dapat dilihat dari 2 (Dua) hal yaitu **pencapaian kinerja output** dan **kinerja keuangannya**.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra PD dan RKPD Pemerintah

Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator Kinerja yang ditetapkan.

Pada Renja tahun 2023 BKPSDM melaksanakan 3 program, 14 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.856.106.991,- atau sebesar 96,10% dari total anggaran Rp10.856.528.798,-. Pada tahun 2024 3 program, 14 Kegiatan dan 48 sub kegiatan dengan realisasi Rp11.786.380.485,- atau 93,13 % dari pagu anggaran Rp12.656.329.798,- . Pada tahun 2025 realiasi sampai dengan triwulan II tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.484.683.506,- atau sebesar 32,54% dari pagu Rp10.706.956.798, yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp1.733.767.129,- atau sebesar 46,89% dari pagu anggaran sebesar Rp3.696.769.298,-.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.739.216.377,- atau sebesar 24,92% dari anggaran Rp6.976.587.500,-
- Belanja Modal sebesar Rp11.700.000 atau sebesar 34,82% dari pagu anggaran sebesar Rp33.600.000,-.

Dengan rincian dapat dilihat pada tabel (2.1) berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025
Kabupaten Luwu Timur

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tw II Tahun 2025		Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II 2025 (n)						Target Program dan Kegiatan 2025(Renja Perubahan SKPD) Tahun n	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan				
							Target Renja SKPD Tahun 2025		Realisasi Renja SKPD Tahun 2025 (Tahun n)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	%	24,29	%	100	%	24,29	%	24,29	%	100	%	24,29	%	24,29	%
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10	Dokumen	1	Dokumen	10	Dokumen	4	Dokumen	40	%	11	Dokumen	4	Dokumen	40	%
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang Disusun tepat Waktu (Dokumen)	2	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	%	2	Dokumen	0	Dokumen	0	%
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang Disusun Tepat Waktu	2	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	%	2	Dokumen	0	Dokumen	0	%

		(Dokumen)																
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat Waktu (Dokumen)	14	Laporan	3	Dokumen	14	Laporan	8 Laporan	Dokumen	57,14	%	14	Dokumen	8	Dokumen	57,14	%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah	95	%	75,31	%	95	%	75,31	%	79,28	%	95	%	75,31	%	79,28	%
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan (Orang)	32	Orang	29	Orang	32	Orang	29	Orang	90,63	%	47	orang	29	orang	90,63	%
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Dokumen)	5	Laporan	1	Laporan	5	Laporan	1	Laporan	60	%	5	Laporan	3	Laporan	60	%
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang ditatausahakan	100	%	50	%	100	%	50	%	50	%	100	%	50	%	50	%
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun (Laporan)	4	Laporan	1	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	50	%	4	Laporan	1	Laporan	100	%
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	29,64	%	100	%	44,64	%	36,79	%	100	%	36,79	%	36,79	%

5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan TUSI yang mengikuti pendidikan dan pelatihan(orang)	7	Orang	0	Orang	7	Orang	4	Orang	57,14	%	7	orang	4	orang	57,14	%
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	4	Orang	0	Orang	4	Orang	0	Orang	0	%	0	orang	0	orang	0	%
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	10	Orang	4	Orang	10	Orang	4	Orang	40	%	12	orang	4	orang	34,87	%
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	%	75,00	%	100	%	75,00	%	75	%	100	%	75	%	75	%
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	13	Paket	13	Paket	13	Paket	13	Paket	100	%	13	Paket	13	Paket	100	%
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	Paket	15	Paket	15	Paket	15	Paket	100	%	17	Paket	15	Paket	100	%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	31	Paket	31	Paket	31	Paket	31	Paket	100	%	32	Paket	31	Paket	100	%

		disediakan (Paket)																
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	4	Paket	4	Paket	4	Paket	4	Paket	100	%	2	Paket	4	Paket	100	%
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50	%	2	Dokumen	1	Dokumen	50	%
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50	%	2	Laporan	1	Laporan	50	%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50	%	2	Laporan	1	Laporan	50	%
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50	%	2	Dokumen	1	Dokumen	50	%
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ditatausahakan	100	%	0	%	100	%	0	%	0	%	100	%	0	%	0	%
5.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	%	0	unit	0	Unit	0	%
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	0	Unit	2	Unit	0	Unit	0	%	10	Unit	0	Unit	0	%
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	Unit	0	Unit	8	Unit	0	Unit	0	%	22	Unit	0	Unit	0	%

5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	50	%	100	%	50	%	50	%	100	%	50	%	50	%
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat menyurat (Laporan)	2	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50	%	2	Laporan	1	Laporan	50	%
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50	%	2	Laporan	1	Laporan	50	%
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50	%	2	Laporan	1	Laporan	50	%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	%	85,44	%	100	%	85,44	%	85,44	%	100	%	85,44	%	85,44	%
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100	%	6	Unit	6	Unit	100	%
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100	%	6	Unit	6	Unit	100	%

	Operasional atau lapangan	pajak dan perizinannya																
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	79	Unit	11	Unit	79	Unit	33	Unit	41,77	%	82	Unit	33	Unit	41,77	%
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	%	1	Unit	1	Unit	100	%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaiannya	95	%	37,50	%	95	%	37,50	%	39,47	%	95	%	37,5	%	39,47	%
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	%
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	4	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	4	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%

5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi dan dipromosi	95	%	33,33	%	95	%	33,33	%	35,09	%	95	%	33,33	%	35,09	%
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	%
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	95	%	39,40	%	95	%	39,40	%	41,47	%	95	%	95	%	100	%
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen pengelolaan Assessment Center	2	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	%	1	Dokumen	0	Dokumen	0	%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan lanjutan	5	Orang	5	Orang	5	Orang	5	Orang	100	%	5	Orang	5	Orang	100	%
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN jabatan fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	500	Orang	35	Orang	500	Orang	91	Orang	18,20	%	150	Orang	91	Orang	18,20	%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan penilaian dan Evaluasi kinerja	95	%	110	%	95	%	110	%	115,79	%	95	%	110	%	115,79	%

5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4	Dokumen	1	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%	4	Dokumen	2	Dokumen	50	%
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	280	Orang	0	%	280	Orang	0	%	0	%	532	Orang	0	Orang	0	%
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	5	Orang	2	Orang	5	Orang	20	Orang	400	%	35	Orang	20	Orang	400	%
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	2	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50	%	2	Dokumen	1	Dokumen	50	%
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan hasil evaluasi disiplin ASN	2	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	50	%	2	Laporan	1	Laporan	50	%
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensi teknisnya	100	%	60	%	100	%	60	%	60	%	100	%	60	%	60	%
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	170	Orang	102	Orang	170	Orang	102	Orang	60	%	328	Orang	102	Orang	60	%
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan	Jumlah dokumen hasil pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pengembangan	3	Dokumen	2	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	66,67	%	8	Dokumen	2	Dokumen	66,67	%

	pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum																
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang tersertifikasi dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	100	%	25,56	%	100	%	25,56	%	25,56	%	100	%	25,56	%	25,56	%
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah (Dokumen) kebijakan Teknis dan rencana sertifikasi Kompetensi, pengelolaan Kelembagaan, tenaga Pengembang kompetensi, Sumber belajar, kerjasama, Pengembangan kompetensi Pimpinan daerah, jabatan Pimpinan tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional yang disusun	8	Dokumen	2	Dokumen	8	Dokumen	2	Dokumen	25	%	9	Dokumen	2	Jenis	25	%

5.04.02.2.02.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan prajabatan	3	Laporan	0	Laporan	3	Laporan	0	Laporan	0	%	3	Laporan	0	Laporan	0	%
-----------------	---	---	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------	---	---	---	---------	---	---------	---	---

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bisnis proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Luwu Timur yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 telah ditetapkan sesuai periode Renstra. Berdasarkan Renstra 2021-2026, IKU BKPSDM Kabupaten Luwu Timur sesuai Keputusan Nomor 23 Tahun 2021 mempunyai 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dan 1 Indikator penunjang yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA BKPSDM KABUPATEN LUWU TIMUR							
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD	SATUAN	Formulasi	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Sasaran RPJMD Yang Diacu	Sasaran Renstra OPD					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur	1 Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Sub Bidang Kinerja	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	2 Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%	$\frac{\text{Jumlah SDMA yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional}}{\text{Jumlah keseluruhan SDMA}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	3 Nilai SAKIP	%		Laporan Hasil Evaluasi AKIP	SEKRETARIAT (Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan)

Pada Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menetapkan 67 (Enam Puluh Tujuh) Indikator Kinerja yang terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 64 (Enam Puluh Empat) Indikator Kinerja (IK) program, kegiatan, dan sub kegiatan. Adapun capaian target untuk IKU BKPSDM sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal (2021)	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
Cakupan ASN yang tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin	%	99,88	99,90	99,95	99,99	100	100	100
Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	%	80,61	81,82	82,10	83,50	70	75	75
NILAI SAKIP	%	70	71	72	77	79	80,5	80,5

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama yang ke-1 yaitu “Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin” memiliki sasaran kinerja meningkatnya disiplin aparatur. Penanggung jawab untuk IKU yang ke -1 adalah Bidang pengadaan, pemberhentian, kinerja dan informasi kepegawaian sekaligus menjadi sumber data untuk mengetahui realisasi capaian kinerja. Jumlah pegawai Kabupaten Luwu Timur per 30 Juni 2025 yaitu sebanyak 5.222 orang pegawai yang terdiri dari PNS sebanyak 3.611 orang dan tenaga PPPK sebanyak 1.611 orang). Sampai dengan Triwulan II terdapat 20 orang yang yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, 3 orang dilaporkan terkait kasus perselingkuhan, 17 orang lainnya dilaporkan terkait kasus pelanggaran Netralitas ASN. Pegawai yang dilaporkan terkait kasus perselingkuhan saat masih dalam proses di Insektorat. Sedangkan untuk 17 orang terkait kasus pelanggaran Netralitas ASN yang telah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil diantaranya 3 orang telah dikenakan hukuman disiplin dengan pemberian sanksi moral/etik, 9 orang dinyatakan tidak melakukan pelanggaran disiplin dan 5 orang lainnya saat ini masih dalam proses penilaian hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Netralitas ASN. Berdasarkan rincian penjelasan diatas maka diperoleh data sebanyak 3 orang ASN yang telah dijatuhi hukuman disiplin sampai dengan triwulan II.

2. Indikator kinerja utama yang ke-2 yaitu “persentase sumber daya manusia aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional memiliki sasaran kinerja meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur. Penanggung jawab untuk IKU yang ke -2 adalah Bidang Pengembangan sumber daya aparatur sekaligus menjadi sumber data untuk mengetahui realisasi capaian kinerja. Realisasi kinerja sebesar 77,79% dari target 85% sehingga capaiannya adalah sebesar 91,52%. Jumlah ASN Kabupaten luwu Timur per 30 Juni 2025 sebanyak 5.222 orang (3.611 orang PNS dan 1.611 orang PPPK) dan berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan 30 Juni tahun 2025 diketahui sebanyak 4062 orang pegawai telah memiliki sertifikat kompetensi baik teknis, manajerial maupun fungsional. Indikator Kinerja ini adalah membandingkan antara Jumlah Pegawai yang memiliki Sertifikat Kompetensi (Teknis, Manajerial dan Fungsional) dengan jumlah keseluruhan ASN (PNS dan PPPK) sehingga dapat digambarkan capaian kinerja 2 komponen tolak ukur tersebut berbanding lurus, jika jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi bertambah dan jumlah ASN bertambah maka persentase capaian yang diperoleh akan maksimal, namun sebaliknya apabila jumlah ASN bertambah tetapi tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah pegawai yang bersertifikasi kompetensi maka secara otomatis persentase capaian yang diperoleh akan rendah.
3. Indikator kinerja Utama yang ke-3 yaitu “Nilai SAKIP” memiliki sasaran kinerja yaitu meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target

kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong entitas unit organisasi dan entitas Satuan Kerja terkhusus bagi BKPSDM untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Penilaian atas evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu setelah berakhirnya periode satu tahun anggaran. Adapun nilai SAKIP yang diperoleh untuk tahun 2024 yaitu 77,45 dengan predikat BB dari target sebesar 79 sehingga capaiannya adalah sebesar 98,04%. Perolehan nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan perolehan nilai sebesar 80,35.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Bidang Kepegawaian berdasarkan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PERMENDAGRI 86 Tahun 2017

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	9	7	11	17	20	20
Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,26	13,23	20,49	27,73	34,88	35
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	4,07	10,55	24,74	38,82	52,66	53
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	Orang	33	35	35	35	35	35
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan	Orang	787	750	700	700	600	500

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2800	3300	3450	3600	3750	3900
--	-------	------	------	------	------	------	------

Capaian IKK sampai dengan Tahun 2024 untuk periode Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan sampai dengan Triwulan II Per 30 Juni Tahun 2025 terealisasi diantaranya yaitu Diklat Penyusunan Renstra sebanyak 56 peserta dengan 61 JP, Diklat BOSP dengan peserta 46 orang dengan 30 JP, dan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2025 diperoleh dari diperoleh dari total keseluruhan JP dari 2 jenis diklat yang diselenggarakan oleh BKPSDM dengan total peserta sebanyak 102 orang kemudian dibagi dengan jumlah PNS kabupaten luwu timur per 30 Juni 2025 sebanyak 5.222 Orang terdiri dari 3.611 orang PNS dan 1.611 orang PPPK.
2. Kondisi jumlah ASN kabupaten Luwu Timur per 30 Juni 2025 mencapai 5222 orang (PNS sebanyak 3.611 orang dan PPPK sebanyak 1.611 orang). Dari keseluruhan jumlah ASN tahun 2025 terdapat 102 orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan BKPSDM dan terdapat 2 Jenis Diklat yang diselenggarakan per triwulan II tahun 2025 yang terdiri dari 2 Diklat teknis. Adapun Diklat Teknis yang diselenggarakan diantaranya yaitu Diklat Penyusunan Renstra sebanyak 56 peserta dan Diklat BOSP sebanyak 46 orang peserta,
3. Sebanyak 386 orang Pejabat Struktural Kabupaten Luwu Timur per 30 Juni 2025 terdapat 305 orang yang telah dikembangkan kompetensinya. Dan dari 4.355 orang pejabat fungsional Fungsional Kabupaten Luwu Timur per 31 Maret 2025 terdapat 907 Orang yang telah mengikuti pengembangan kompetensi fungsional. Artinya dari 4.741 orang Pegawai struktural dan fungsional terdapat 1.212 orang yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 30 Juni 2025 yang terisi sebanyak 28 Jabatan. Terdapat 7 jabatan yang lowong diantaranya:
 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang Pensiun Dini dengan alasan mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati;
 2. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian yang mutasi ke Kemendikbud Riset dan Teknologi.
 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pensiun per 31 Des 2024
 4. Kepala Dinas DPMPSTSP pensiun per 31 Des 2024
 5. Kepala BKPSDM Pensiun Per 1 Feb 2025
 6. Kepala Dinas Sosial dan P3A Pensiun per 1 Maret 2025
 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pensiun per 1 Mei 2025

5. Untuk data jumlah jabatan administrasi pada Instansi Pemerintah Kab. Luwu Timur per 30 Juli 2025 adalah sebanyak 889 orang yang terdiri dari Eselon II 28 Orang, Eselon III 158 orang, Eselon IV 228 orang, dan teknis lainnya 475 orang
6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 4.391 orang, yang terdiri dari 2.781 orang PNS dan 1.611 orang PPPK.

Tabel 2.2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu Timur

No.	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	Tahun 2023 (Thn n-2)	Tahun 2024 (Thn n-1)	Tahun 2025 (Thn n)	Tahun 2026 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin			99,95%	99,99%	99,99%	100%	99,83%	99,93%	99,99%	100%	
2	Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional			82,10%	83,50%	70%	75%	93,03%	81,66%	70%	75%	
3	NILAI SAKIP			72	77	79	80,5	80,35	77,45	75,50	75,75	

Kedudukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang di bidang pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penempatan pegawai, perumusan dan pengembangan aparatur serta tugas pembantuan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 88 Tahun 2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian, kinerja dan informasi kepegawaian;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, kepangkatan dan pengembangan karir;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
- d. Pelaksanaan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur. Susunan organisasi tersebut terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja, dan Informasi Kepegawaian :
 - d. Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir, terdiri atas:
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Berjalannya organisasi BKPSDM sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Data per Juli 2025 pada BKPSDM sebanyak 45 (Empat Puluh Enam) orang dengan rincian 43 orang ASN (24 orang PNS dan 4 orang PPPK) dan 15 orang Upah Jasa dengan profil demografi disajikan pada tabel 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10 dan 2.2.11; dan 2.2.12

Tabel 2.2.5
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Badan		1					1
2	Sekretariat	1	8	1	6	0	1	17
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1	3					4
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian		10		1			11
5	Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir		9		1			10
Jumlah		2	31	1	8	0	1	43

Tabel 2.2.6
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Unit Kerja	Tingkat Golongan / Kepangkatan					Jumlah
		IV	III	II	I	IX	
1	Kepala Badan	1					1
2	Sekretariat	2	3	2		2	9
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1	1				4
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan informasi Kepegawaian	1	3	1		2	8
5	Bidang Mutasi, Kepegawaian, dan Pengembangan Karir		7				7
Jumlah		5	14	3		4	28

Tabel 2.2.7
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Unit Kerja	Tingkat Eselon						Jumlah
		II.b	III.a	III.b	IV.a	Staf PNS	PPPK	
1	Kepala Badan							
2	Sekretariat		1		2			9
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur			1				3
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan informasi Kepegawaian			1				5
5	Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian			1				3
6	Tenaga Fungsional							
Jumlah		0	1	3	2			21

Tabel 2.2.8
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Unit Kerja	Tingkat Fungsional						Jumlah
		III/a	III/b	III/c	III/d	Staf PTT	Jumlah	
1	Kepala Badan							
2	Sekretariat	1						1
	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur							
3	Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian	1		2				3
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir	1		2	1			5
5	Tenaga Fungsional							
Jumlah		3		4	1			8

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kab. Luwu Timur

Perencanaan pembangunan jangka menengah OPD tahun 2021 – 2026 pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan tindakan selama 5 (lima) tahun kedepan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjadikan RPJMD sebagai rujukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dalam setiap tahun anggaran.

Isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan SKPD. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementrian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isi-isu strategis BKPSDM Kabupaten Luwu Timur.

Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kab. Luwu Timur adalah:

1. Adanya pandangan masyarakat terhadap PNS bahwa Sebagian Pegawai Negeri di tengarai masih tidak kompeten (incompetence) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan public.
2. PNS tidak terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi) dan PNS yang ada tidak berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas fungsi jabatan yang diduduki (mismatch).
3. PNS yang ada tidak diberdayagunakan secara optimal (under employment) dan kinerja rendah (under performance).
4. PNS yang ada sampai saat ini belum dibina dengan suatu sistem manajemen yang dapat mewujudkan PNS sebagaimana harapan masyarakat.
5. Sistem manajemen yang ada belum didukung dengan sub-sub system atau komponen manajemen kepegawaian (prakondisi) yang memungkinkan dicapainya kondisi PNS yang diinginkan.
6. Sebagai kondisi nyata yang ada Nampak sebagai berikut: pembinaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, Pola Karir PNS yang jelas.
7. Evaluasi Kinerja PNS belum berdasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis merit, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan karirnya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatannya dan beban kerja (Sistem Renumerasi Berbasis Kinerja);
8. Belum terbangunnya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya, mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai tidak merata;
9. Berbagai regulasi dan kebijakan Pembina PNS (Peraturan perundang-undangan kepegawaian) Sebagian besar belum disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pembinaan, dalam rangka perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan Informasi (database) kepegawaian yang memadai.

10. Kondisi Kepegawaian yang ada masih diwarnai ketidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan BKPSDM Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kepegawaian ASN daerah Kabupaten Luwu Timur, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM terdapat beberapa hal tantangan yang dihadapi BKPSDM dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi:

1. Rendahnya tingkat kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara
2. Kurangnya Disiplin Apartur Sipil Negara
3. Belum Maksimalnya pelayanan Kepegawaian
4. Minimnya Kegiatan Diklat Teknis dan Struktural yang dilaksanakan
5. Kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara terhadap tugas dan tanggungjawabnya
6. Kurangnya partisipasi Aparatur Sipil Negara dalam melengkapi Data Kepegawaian
7. Anggaran yang terus mengalami penurunan setiap tahun

Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan Kepegawaian pada ASN;
2. Diterapkannya peraturan pemerintah tentang ASN;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara melalui Pendidikan dan pelatihan fungsional, tekhnis, dan pelatihan manajerial;
4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada; dan
5. Mengoptimalkan sistem pengolahan data, akses dan informasi serta komunikasi jaringan elektronik untuk keperluan manajemen Kepegawaian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD tahun 2025 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, perbedaan pada target pencapaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan

BKPSDM. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
BKPSDM Kab. Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	pesentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	96 %	5,252,776,098	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	pesentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	96 %	5.085.064.554	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 %	269,457,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100 %	141.108.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	80.560,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	11	59.730.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	17.872.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	13.754.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	13,222,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	12.545.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat	14	93.887,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	55.078.500	

			daerah yang disusun (Dokumen)					(Laporan)			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	95 %	3,614,059,305	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	95 %	3.563.725.954	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	32	3,696,769,298	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	47	3.492.655.954	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	5	111,287,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	71.070.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	10 0%	13,817,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	10 0%	19.344.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	4	35,146,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	19.344.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	10 0%	229,735,350	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	10 0%	140.462.500	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian		Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian	4	41,755,350	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	4	38,202,500	

	n		n yang dimutakhirkan (Laporan)			n		Administrasi Kepegawaian (Dokumen)			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)	7	66,740,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	17.940.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	4	22,200,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	4	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	10	89,840,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	10	84.320.00	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	95 %	640,705,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100 %	501.097.600	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	13	10,959,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan (Paket)	13	10,959,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	15	25,368,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	15	24.477.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	31	33,034,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	31	32.894.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang cetak dan/atau penggandaan yang diadakan	4	53,960,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	44,960,000	

			(jenis)					(Paket)			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	2	5,100,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	2	5,100,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	60,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	54,180,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	303,620,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	318.456.600	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	12,271,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	10,071,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	230,797,393	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Penunjang yang terpenuhi (%)	100%	342.870.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	63,380,020	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (unit)	2	11,700,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit)	2	42.400.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	8	34,260,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	8	300.470.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan (Paket)	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya diadakan (Paket)	0	0	

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	10 0%	243,117 ,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	10 0%	215.540 .500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat menyurat (Laporan)	2	16,300, 500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyedia Jasa Surat menyurat (Laporan)	2	16.100. 50	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	2	87,000, 000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	2	91.440. 000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	114,000 ,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	108.000 .000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	10 0%	341,504 ,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik (%)	10 0%	160.916 .000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6	17,900, 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	6	17,900, 000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6	26,100, 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (Unit)	6	27.700. 000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	79	49,880,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	82	45.680.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)	1	34,818,000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)	1	69.636.000	
I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	96	4,894,347,703	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	100	2.031.349.950	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaian	95%	914,881,650	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (%)	95%	579.012,650	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN)	1	74,140,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	38,256,000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	4	524,521,000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	4	394.449.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	4	75,314,000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	4	86.185.000	

	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	47,304,650	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	60.122.650	
2	Mutasi dan Promosi ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	95 %	834,230,000	Mutasi dan Promosi ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	95 %	685.523.000	
	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4	161,925,000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	4	119.089.000	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	50,304,000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4	76.016.000	
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi ASN	1	419,648,000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	490.418.000	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	95 %	2,846,996,921	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persentase Rata-rata Capaian Pengembangan Kompetensi ASN (%)	90 %	555.656.300	
	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2	686,912,000	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	2	197.305.500	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan (Orang)	5	360,342,000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5	323.969.000	

	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir'	500	74,561,000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	500	34.381.800	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	95%	327,814,500	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	Persentase Rata-rata Capaian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)	95%	211.158.000	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	4	75,197,000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	4	42.991.000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	280	78,990,000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah Orang ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	532	71.390.000	
	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	5	62,271,000	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan (Orang)	35	57.968.000	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	2	16,248,000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani (Dokumen)	2	19.056.000	
	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah laporan hasil evaluasi disiplin ASN	2	59,339,000	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	2	19.056.000	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang lulus dan meningkatkan kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat	40	1,690,825,915	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang lulus dan meningkatkan kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat	40	1.700.218.000	

1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	100%	2,274,734,500	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Jumlah ASN yang lulus Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis melalui BKPSDM (%)	100%	1.6.19.355.500
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	170	1,181,818,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	328	1.454.790.000
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM	3	128,660500,000	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan (Dokumen)	8	164.565.500

2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	100%	1,591,638,500	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	100%	80.862.500	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional		Jumlah (Dokumen) kebijakan Teknis dan rencana sertifikasi Kompetensi, pengelolaan Kelembagaan, tenaga Pengembangan kompetensi, Sumber belajar, kerjasama, Pengembangan kompetensi Pimpinan daerah, jabatan Pimpinan tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional yang disusun	8	13,890,000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	9	19.305.000	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota		Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi dan tugas belajar (Orang)	-	-	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota		Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi dan tugas belajar (Orang)			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan Pimpinan tinggi, jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan	3	1,450,022,000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan (Laporan)	3	61.557.500	
Jumlah					12,776,190,698	Jumlah					8.816.632.504

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diajukan pada Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2025
Kabupaten Luwu Timur

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program Kegiatan dan sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	pesentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	96%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	14	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	95%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100%	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	100%	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	4	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan (Orang)	10	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan (Paket)	13	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	15	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan (Paket)	31	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Dokumen)	2	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100%	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat (Laporan)	2	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	

			(Laporan)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	6	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	79	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	100	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaianya	95%	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	4	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	4	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	
	Mutasi dan Promosi ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	95%	
	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	4	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	90%	

		pengembangan kompetensi			
	Pengelolaan Assessment Center		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	2	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	500	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	95%	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	4	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang diberikan Penghargaan (Orang)	280	
	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	2	
	Evaluasi Disiplin ASN		Jumlah laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	2	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang lulus dan meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat	40	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensi teknisnya	100%	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	170	
	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM (Dokumen)	3	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	100%	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi		Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi	8	

	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Pimpinan Daerah, Jabatan Fungsional yang disusun (Dokumen)		
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan (Laporan)	3	

Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Timur yang berasal dari forum SKPD/hasil jaring aspirasi/usulan masyarakat/hasil reses DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Adapun program nasional yang dilaksanakan BKPSDM termasuk dalam urusan wajib program peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Salah satu program wajib tersebut lebih menekankan pada kebutuhan daerah para penyelenggara pemerintahan yaitu ASN, sehingga kebutuhan akan ASN di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang di butuhkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur melalui kajian Bezetting termasuk PNS yang masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Timur

Tujuan dan sasaran rencana kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Timur yaitu:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025
- b. Menjadi acuan bagi seluruh Bidang dan Sekretariat BKPSDM Kabupaten Luwu Timur
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program/kegiatan antara Bidang dan Sekretariat pada BKPSDM Kabupaten Luwu Timur
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran BKPSDM Kabupaten Luwu Timur.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, BKPSDM menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan yakni:

“Mewujudkan sumber Daya Manusia aparatur yang berkualitas”

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas, maka sasaran jangka menengah BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di jabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas ASN melalui Diklat;
2. Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian;
3. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
2. Visi Kementerian PAN RB
3. Visi BKN Pusat
4. Visi dan Misi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur
5. Usulan dari pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Indeks Profesional ASN	1 Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%
			2 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	2 Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	85%
			3 NILAI SAKIP	3 Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan	79

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BKPSDM Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2025 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 / Kepmen 050-3708 Tahun 2020, menguraikan dalam 3 (Tiga) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 48 (Empat Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp8.486.122.504,- dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
BELANJA			
BELANJA OPERASI	10.673.356.798	9.652.985.948	(1.020.370.850)
Belanja Pegawai	3.696.769.298	3.696.769.698	400
Belanja Barang dan Jasa	6.976.587.500	5.956.216.250	(1.020.371.250)
BELANJA MODAL	33.600.000	33.600.000	296.910.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.600.000	330.510.000	296.910.000
Jumlah Belanja	10.706.956.798	9.686.585.948	(1.020.370.850)

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025										Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Tolok Ukur				Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				Sebelum
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									10.706.956.798	8.816.632.504				10.954.915.000		
5	3				KEPEGAWAIAN										7.932.566.298	7.116.414.504				8.954.818.000	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar		96%	96%					5.165.549.648	5.085.064.554		97%	97%	5,095.818.000	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan.					100%	100%	205.541.500	141.108.000		100%	100%	71,000,000		
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)		Kab. Luwu Timur, Malili Punc			10 Dok	11 Dok		80.560.000	59.730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10 Dok	10 Dok	40.000.000	

							ak Indah									(PAD)			
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	Kab. Luwu Timu r, Malili Punc ak Indah			2 Dok	2 Dok			17.872.500	13.754.00	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	2 Dok	2 Dok	3.000.000
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	Kab. Luwu Timu r, Malili Punc ak Indah			2 Dok	2 Dok			13.222.000	12.545.500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	2 Dok	2 Dok	3.000.000
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kab. Luwu Timu r, Malili Punc ak Indah			14 Lap ora n	14 Lap oran			93.887.000	55.078.500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	10 Dok	10 Dok	25.000.000
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan						95%	95%	3.808.056.298	3.563.725.954		95%	95%	4.052.518.000
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu Timu r, Malili , Punc uk Indah			32 Ora ng	48 Ora ng			3.696.769.298	3.492.655.954	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	39 orang	39 orang	4.007.518.000

5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			5 Laporan	5 Laporan			111.287.000	71.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Dok	7 Dok	45.000.000
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar						100 %	100 %	35.146.000	19.344.000		100%	100%	10,000,000
5	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Laporan	4 Laporan			35.146.000	19.344.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dok	1 Dok	10,000,000
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah						100 %	100 %	220.535.350	140.462.500		100%	100%	32.950.000
5	3	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Dokumen	4 Dokumen			41.755.350	38.202.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000
5	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			7 Orang	7 Orang			66.740.000	17.940.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	5 Orang	38,350,000

5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur , Malili, Puncuk Indah			4 Ora ng	4 Ora ng			22.200.000	0	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	4 Ora ng	4 Ora ng	37,500,000
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu Timur , Malili, Puncuk Indah			10 Ora ng	10 Ora ng			89.840.000	84.320.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	5 Orang	5 Orang	0
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah						95%	95%	504.312.000	501.097.600		95%	95%	372.500.000
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			13 Pak et	13 Pak et			10.959.000	10.959.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	7 Jeni s	7 Jeni s	13.000.000
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			15 Pak et	15 Pak et			25.368.000	24.477.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	20 Unit	20 Unit	30,000,000
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			31 Pak et	31 Pak et			33.034.000	32.894.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	20 Jeni s	20 Jeni s	10,000,000

5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Pak et	4 Pak et			53.960.000	44.960.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	3 Jeni s	3 Jeni s	24.000.000
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Dok	2 Dok			5,100,000	5,100,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	48 Eks	48 Eks	5,500,000
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Lap oran	2 Lap oran			60.000.000	54.180.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	650 Orang	650 Orang	20.000.000
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Lap oran	2 Lap oran			303.620.000	318.456.600	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	140 Kali	140 Kali	250.000.000
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Dok	2 Dok			12.271.000	10.071.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	1 Dok	1 Dok	20,000,000
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi						100 %	100 %	45.960.000	342.870.000		100%	100%	120.000.000

5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Unit	2 Unit			11.700.000	42.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Unit	20 Unit	70,000,000
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			8 Unit	16 Unit			34.260.000	300.470.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	5 Unit	50,000,000
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah							0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	0	0
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						100 %	100 %	217.300.500	215.540.500		100 %	100 %	213.000.000
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Laporan	2 Laporan			16.300.500	16.100.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Surat	200 Surat	35,000,000
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Laporan	2 Laporan			87.000.000	91.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36 Rekening	36 Rekening	52.000.000

5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Laporan	2 Laporan			114.000.000	108.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Orang	8 Orang	126.000.000
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik						100 %	100 %	128.698.000	160.916.000		100 %	100 %	133.000.000
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			6 Unit	6 Unit			17.900.000	17.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	2 Unit	35.000.000
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			6 Unit	6 Unit			26.100.000	27.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Unit	4 Unit	13.000.000
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			79 Unit	79 Unit			49.880.000	45.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 Unit	55 Unit	35.000.000
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			1 Unit	1 Unit			34.818.000	69.636.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	1 Unit	50.000.000

5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	96 %	96 %	2.767.016.650						2.031.349.950		97%	97%	3.850.000.000
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, pemberhentian danj informasi kepegawaian ASN						95%	95 %	721.279.650	579.012.650		95%	95%	1.085.000.000
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncu k Indah			1 Dok.	1 Dok.			74.140.000	38.256.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	1.620 Form asi	1,620 Form asi	350,000,000
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncu k Indah			4 Dok.	4 Dok.			524.521.000	394.449.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	500 Orang	500 Orang	550,000,000
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncu k Indah			4 Dok	4 Dok			75.314.000	86.185.000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100%	100%	135,000,000
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaiaan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncu k Indah			4 Dok	4 Dok			47.304.650	60.122.650	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	5 Aplika si	5 Aplika si	50,000,000
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase rata- rata capaian pengelolaan mutasi dan promosi ASN					95%	95 %	631.877.000	685.523.000		95%	95%	750,000,000	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen	Kab. Luwu			4 Dok	4 Dok			161.925.000	119.089.000	PEND APAT	84.8	84.8	150,000,000

						Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Timur, Malili, Puncuk Indah									AN ASLI DAERAH (PAD)	9%	9%	
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Dok	4 Dok			50.304.000	76.016.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	100%	300,000,000
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			1 Dok	1 Dok			419.648.000	490.418.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	100%	300,000,000
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase rata-rata capaian pengembangan kompetensi ASN						95%	95%	1.121.815.000	555.656.300		95%	95%	1.670.000.000
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Dok	2 Dok			686.912.000	197.305.500	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	95%	95%	250,000,000
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			5 Orang	5 Orang			360.342.000	323.969.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Orang	20 Orang	1.320.000.000
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			500 Orang	500 Orang			74.561.000	34.381.800	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	90%	90%	100,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN BKPSDM_TAHUN 2025

						Karir													
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase rata-rata capaian penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	90%	90 %	27 7,1 80, 94 0	273, 680, 940		95%	95 %	292.045.000	211.158.000	3	2	2.04	345.000.000
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Dok	4 Dok			75.197.000	42.991.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	100 %	100,000,000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			280 Orang	280 Orang			78.990.000	71.390.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	100 %	90.000.000
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			5 Orang	20 Orang			62.271.000	57.968.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	100 %	10,000,000
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Dok	2 Dok			16.248.000	19.753.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	75%	75%	45,000,000
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			2 Laporan	2 Laporan			59.339.000	19.056.000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	100 %	100,000,000
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									2.774.390.500	1.700.218.000				2.009.097.000
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti		20 %	20 %					2.774.390.500	1.700.218.000				2.009.097.000

						pengembangan kompetensi minimal 20JP/Tahun													
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM						95%	95%	1.310.478.500	1.619.355.500		100%	100%	1.190.800.000
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			170 Oran g	333 Oran g			1.181.818.000	1.454.790.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	130 Oran g	130 Oran g	1.080.300.000
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			3 Dok	3 Dok			128.660.500	164.565.500	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	3 Jeni s	3 Jeni s	110,500,000
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	Persentase jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						95%	95%	1.463.912.00	80.862.500		95%	95%	818.297.000

RENCANA KERJA PERUBAHAN BKPSDM_TAHUN 2025

					dan Fungsional														
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			8 Dok	8 Dok			13.890.000	19.305.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Jenis	4 Jenis	30,000,000
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			3 Laporan	3 Laporan			1.450.022.000	61.557.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	100 %	788.297.000
TOTAL														10.706.956.798	8.486.122.504	10.954.915.000			

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang menggambarkan jumlah program, jumlah kegiatan, serta alokasi kebutuhan dana Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaa BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2025

No.	Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2025		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	98%	5.085.064.554	PAD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	141.108.000	PAD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	11	59.730.000	PAD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	13.754.000	PAD
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	2	12.545.500	PAD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	14	55.078.500	PAD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	3.563.725.954	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	47	3.492.655.954	-PAD - Dana Alokasi Umum (DAU) - DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5	71.070.000	PAD

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	19,344,000	PAD
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	19,344,000	PAD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	140.462.500	PAD
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	38,202,500	PAD
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)	6	17.940.000	PAD
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	PAD
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12	84.320.000	PAD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	501.097.600	PAD
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (paket)	13	10,959,000	PAD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (paket)	17	24.477.000	PAD
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (paket)	32	32.894.000	PAD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (paket)	4	44,960,000	PAD
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dokumen)	2	5,100,000	PAD
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	54,180,000	PAD
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	318.456.600	PAD
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	10,071,000	PAD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	342.870.000	PAD
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	0	0	PAD
2	Pengadaan Mebel (Unit)	10	42.400.000	PAD
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	22	300.470.000	PAD
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (unit)	0	0	PAD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	215,540,000	PAD
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	16,100,500	PAD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)	2	91,440,000	PAD

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	2	108,000,000	PAD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	160.916.000	PAD
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	6	17.900.000	PAD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	6	27,700,000	PAD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	82	45.680.000	PAD
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	1	69.636.000	PAD
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	98%	2.031.349.950	PAD
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95%	579.012.650	PAD
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	38,256,000	PAD
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	4	394.449.000	PAD
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	4	86.185.000	PAD
4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	4	60,122,650	PAD
2	Mutasi dan Promosi ASN	95%	685.523.000	
1	Pengelolaan Mutasi ASN (Dokumen)	4	119,089,000	PAD
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	76,016,000	PAD
3	Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	1	490.418.000	PAD
3	Pengembangan Kompetensi ASN	95%	555.656.300	
1	Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	2	197.305.500	PAD
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Orang)	5	323.969.000	PAD
3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Orang)	150	34.381.800	PAD
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	95%	211.158.000	PAD
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	4	42.991.000	PAD
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai (Orang)	532	71.390.000	PAD
3	Pembinaan Disiplin ASN (Orang)	35	57,968,000	PAD

4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai (Dokumen)	2	19,753,000	PAD
5	Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	2	19,056,000	PAD
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	40%	1.700.218.000	PAD
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	1.619.355.500	PAD
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Orang)	328	1.454.790.000	PAD
2	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	8	164.565.500	PAD
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	80.862.500	PAD
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional (Dokumen)	9	19.305.000	PAD
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1	61,557.500	PAD
JUMLAH			8.816.632.504	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur secara efektif dan efisien dengan memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD tahun 2025.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak begitupun dukungan dari segi penganggaran karena tanpa anggaran yang cukup tentunya akan ada beberapa kegiatan termasuk program nasional yang akan tertunda atau tidak dapat dilaksanakan yang berakibat tidak optimalnya capaian kinerja BKPSDM.

Dalam pelaksanaan Renja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2025 tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan seperti hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu, masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta keberlanjutan dan konsistensi pembangunan.

Adapun rencana tindak lanjut dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2025 yaitu dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu atau mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai amanat peraturan yang berlaku, melakukan evaluasi target kinerja dan anggaran tahun sebelumnya sebagai bahan selanjutnya, perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Aamiin

Malili, 01 Juli 2025

Pdt. KEPALA BKPSDM

Drs. RAPIUDDIN
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19660121 198602 1 002

